



# BEDAH BUKU

Oleh

Ir. Syaiful Hadi, M.Si, Ph.D

Dosen Pada Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

Pekanbaru, 16 Desember 2023

# MITOS vs FAKTA

## BUKU ILMIAH BERKUALITAS

1. Tema menarik
2. Isi buku informatif
3. Dekoratif, kohesi dan objektif
4. Isi buku runtut dengan bahasa terstruktur
5. Referensi jelas dan up to date
6. Memiliki sampul buku dengan kriteria yang baik
7. Terbebas dari plagiarisme
8. Terkualifikasi oleh Tim Reviewer Profesional Sesuai Disimpin ilmu
9. Dipublikasikan dengan ISBN

# ALENIA DAN KALIMAT YANG BAIK DAN BENAR

## Bab 1 Perkembangan Mutakhir Industri Sawit Indonesia

Industri sawit Indonesia yang dibesut saat ini memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial. Berawal dari empat benih kelapa sawit yang dibawa Dr. D. T. Fryxer, yang terdiri dari dua benih *Bourbon-Mauritius* dan dua benih dari Amsterdam (*Jale Dura*) untuk dijadikan sebagai tumbuhan tektel Kebun Raya Bogor pada tahun 1848 (Hanger, 1924; Rutgers *et al.*, 1922). Biji kelapa sawit dari Kebun Raya Bogor tersebut, kemudian disebarluaskan untuk ditanam menjadi tanaman hias (*ornamenta*) sekaligus "aji luhur" di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, maupun Sumatera khususnya di perkebunan tektel atau Deli.

Uji coba penbudidaya kelapa sawit di distrik Deli oleh Deli *Machtverkoop* pada tahun 1878 dengan lahan seluas 0,4 hektar. Manajer Deli *Machtverkoop*, J. Bovel, melaporkan hasil uji coba tersebut cukup menggembirakan, dimana produktivitas tanaman kelapa sawit lebih baik dibandingkan perkebunan di Afrika Barat sebagai habitat asalnya.

Uji coba perkebunan kelapa sawit secara komersial pertama kali dimulai pada tahun 1911 oleh perusahaan Belgia di Pulau Raja (Anabas) dan Sungai Liput (Aneh). Kemudian pada tahun tersebut yakni tahun 1911 dianggap sebagai sejarah awal perkebunan kelapa sawit komersial di Indonesia.

Selain perusahaan Belgia pada tahun yang sama, perusahaan Jerman juga membuka usaha perkebunan kelapa sawit di Tanah Dam Ulu. Langkah investor Belgia dan Jerman kemudian diikuti oleh investor Belanda dan Inggris. Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit terus berkembang dari 19 perusahaan pada tahun 1916 meningkat menjadi 34 perusahaan pada tahun 1920. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pertama di Indonesia dibangun di Sungai Liput (1918) berwujud di Tanah Dam Ulu (1922).

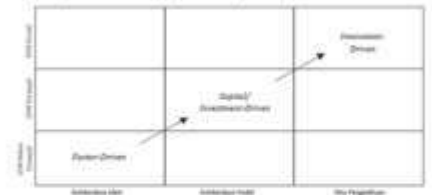
Selama masa kolonial hingga era Orde Lama, perkembangan perkebunan kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh dinastis politik di Indonesia. Proses perubahan kekuasaan dari Pemerintah Kolonial kepada Pemerintah Republik

Selain pertumbuhannya yang revolusioner, hal lain yang mengesankan adalah pertumbuhan perkebunan kelapa sawit rakyat yang relatif cepat. Selama periode tahun 1980-2021, pangsa perkebunan kelapa sawit rakyat meningkat dari hanya sekitar 2 persen menjadi 40 persen (Gambar 1.2). Pangsa perkebunan kelapa sawit swasta juga meningkat dari 30 persen menjadi 56 persen. Sementara itu, meskipun luas perkebunan kelapa sawit negara secara absolut meningkat, namun pangsaanya menurun dari 68 persen menjadi 4 persen.



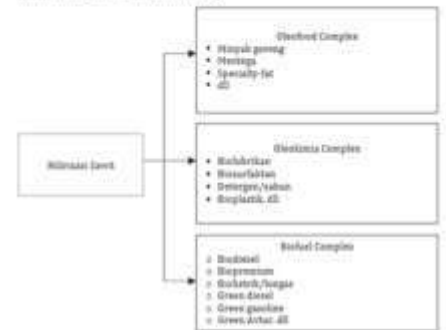
Gambar 1.2. Pangsa Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Berdasarkan Status Penguasaannya Periode Tahun 1980-2021 (Sumber: Kementerian Pertanian RI; data diolah FAO, 2012)

Dari segi peningkatan produksi minyak sawit (*supply side*), perkembangan kelapa sawit Indonesia sedang bergeser dari peningkatan produksi minyak sawit yang didorong oleh tekanan lahan (*factor-driven*) kepada pemanfaatan modal/*embedded technology* (*capital-driven*) dan kesediaan pemanfaatan inovasi (*innovation-driven*) (Gambar 1.3).



Gambar 1.3. Strategi Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit (Sumber: Spangui, 2011, 2018)

Untuk mempercepat pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah kelapa sawit di dalam negeri, pemerintah Indonesia pada tahun 1976 telah membangun industri hilir pertama yakni Pamina (saat ini milik PTPN IV) di Adolina Sumatera Utara. Percepatan hilirisasi kelapa sawit Indonesia dimulai sejak tahun 2011. Tiga jalur hilirisasi kelapa sawit di Indonesia adalah sebagai berikut (Gambar 1.4).



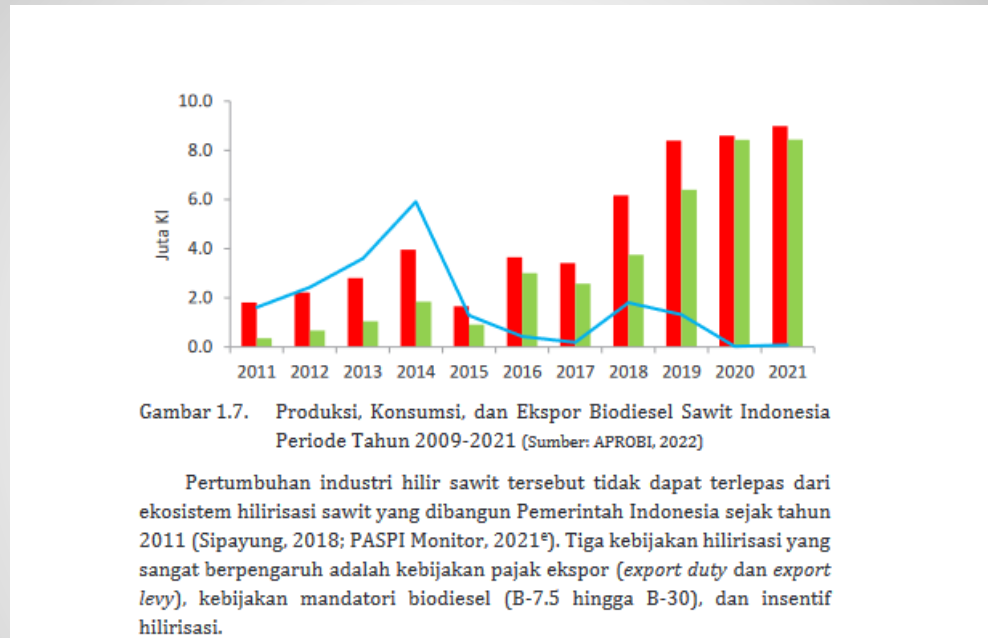
Gambar 1.4. Tiga Jalur Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia (Sumber: Spangui, 2018)

Pertama, jalur Hilirisasi Oleopangan (*Olefinol Complex*) yakni pendalaman industri-industri yang mengolah minyak sawit (CPO dan CPKO) menjadi bahan pangan baik produk olahan antara (*refined palm oil*) maupun produk akhir berbasis minyak sawit (*pure oil-based product*). Berbagai produk hilir oleopangan yang telah dihasilkan di Indonesia antara lain minyak goreng sawit, margarin, shortening, ice cream, creamer, cocoa butter, specialty-fat, dan lain-lain.

Kedua, Jalur Hilirisasi Oleokimia (*Oleokimia Complex*) yakni industri-industri yang mengolah kelapa sawit untuk menghasilkan produk oleokimia dasar (*fatty acid, fatty alcohol, methyl ester, soap emulsif, glicerol*)

PADA BAB 1 → SETIDAKNYA ADA 8 KATA SAMBUNG DAN SEJENISNYA DIAWAL ALENIA

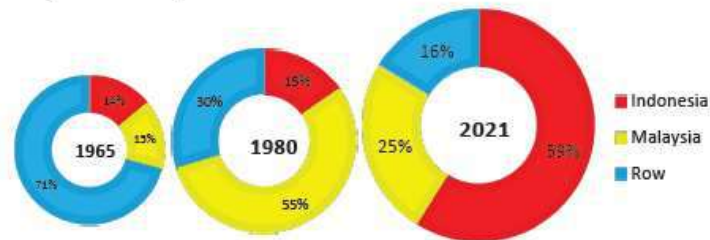
# GAMBAR TANPA KETERANGAN



TIDAK ADA KETERANGAN GAMBAR :  
PRODUKSI, KONSUMSI DAAN EKSPOR

# REST OF THE WORLD (ROW)

Perkembangan industri sawit nasional yang demikian pesat, telah membawa Indonesia merebut posisi teratas sebagai produsen minyak sawit dunia (Gambar 1.10).



Gambar 1.10. Perubahan Pangsa Indonesia dalam Produksi Minyak Sawit Dunia (Sumber: USDA, data diolah PASPI, 2022)

1. Singkatan ROW, pertama sekali digunakan sebaiknya dituliskan kepanjangannya rest of the world (ROW)
2. Konsisten untuk digunakan pada bagian lain. Gambar 3.8 digunakan istilah lainnya.

# MITOS 2 -01

## PERKEBUNAN KELAPA SAWIT LEBIH EKSPANSIF DARI TANAMAN MINYAK NABATI LAINNYA

Tanaman Minyak Nabati	Luas Areal (Ribuan Hektar)			kelipatan	Rata-Rata Pertumbuhan
	1980	2000	2021		
Kedelei	48.488	75.472	129.998	2,7	2,43
Rapeseed	9.893	24.742	37.788	3,8	3,32
Bunga Matahari	5.292	19.764	28.420	5,4	4,18
Kelapa Sawit	1.027	10.093	25.058	24,4	8,10

- Ekspansif (Adjektif /Kata Sifat) dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna CENDERUNG MELUAS.
- Kelapa Sawit memang lebih ekspansif dibanding tanaman minyak nabati lainnya karena kelipatan kenaikan luas areal dan pertumbuhannya lebih besar

# MITOS 2-04

HARGA MINYAK SAWIT LEBIH MAHAL DIBANDINGKAN DENGAN MINYAK NABATI LAINNYA SEHINGGA TIDAK LAYAK MENJADI SUMBER PANGAN MAUPUN ENERGI LAINNYA

Harga minyak sawit lebih murah BUKAN hanya karena produktivitas yang lebih tinggi, tetapi juga oleh faktor:

- Biaya Produksi yg lebih murah
- Efisiensi produksi yang lebih baik

# MITOS 3-09

## KEBERADAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENCIPTAKAN KETERBELAKANGAN DI KAWASAN PEDESAAN

Menurut Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada tahun 2013 setidaknya terdapat 50 kawasan pedesaan terbelakang/terisolir telah berkembang menjadi kawasan pertumbuhan baru dengan basis produksi minyak sawit. Studi PASPI (2017) mengungkapkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis perkebunan kelapa sawit telah berkembang dari Aceh sampai Papua (Tabel 3.4).

Tabel 3.4. Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Daerah yang Berbasis Industri Sawit

Provinsi	Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Aceh	Nagan Raya, Aceh Singkil, Aceh Timur, Subulussalam, Aceh Barat Daya, Aceh Utara dan lainnya
Sumatera Utara	Stabat, Belarang, Sei Rampah, Limapuluh, Perdagangan, Rantau Prapat, Aek Kanopan, Aek Nabara, Kota Pinang, Sosa, Sibuhuan, Panyabungan dan lainnya
Sumatera Barat	Pasaman Barat, Dharmas Raya, Agam, Pesisir Selatan, Sijunjung dan lainnya
Sumatera Selatan	Sungai Lilin, Tugumulyo, Pematang Panggang, Bayung Lencir, Musi Rawas, Peninjauan, Muara Enim, Lahat.
Riau	Pasir Pengaraian, Bangkinang, Siak Sri Indrapura, Rengat, Tembilahan, Bengkalis, Bagan Siapi-Api, Teluk Kuantan, Dumai, Pekanbaru dan lainnya
Jambi	Sarolangun, Sungai Bahar, Sengeti, Kuala Tungkal dan lainnya
Bengkulu	Bengkulu Selatan, Mukomuko, Seluma, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah dan lainnya
Kalimantan Barat	Sanggau, Bengkayang, Ketapang, Sintang, Kubu Ra dan lainnya
Kalimantan Tengah	Sampit, Kuala Pembuang, Pangkalan Bun, Kasongan dan lainnya
Kalimantan Timur	Sangatta, Tenggarong, Tana Pase, Tanjung Redeb, Numukan, Sendawar dan lainnya
Kalimantan Selatan	Batulin, Kotabaru, Pelaihari dan lainnya
Sulawesi	Mamuju, Donggala, Bunku, Luwu, Pasangkayu dan lainnya
Papua & Papua Barat	Keerom, Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Teluk Bintuni, Fak-Fak, Merauke dan lainnya

Sumber: PASPI (2017)

Keberhasilan perkebunan kelapa sawit dalam meningkatkan kemajuan pembangunan daerah juga dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM). Studi PASPI (2022) menunjukkan bahwa tingkat kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara komposit (IDM) pada Desa Sawit lebih tinggi dibandingkan Desa Non-Sawit. Hal ini berarti kehadiran perkebunan kelapa sawit pada kawasan pedesaan mampu meningkatkan kemajuan pembangunan desa. Studi ini juga mengkonfirmasi studi World Growth

## RIAU

Bangkinang, Rengat,  
Tembilahan, Bengkalis

Adalah pusat  
pertumbuhan kawasan  
baru ?

→ Apa dasarnya ?

→ Perlu dikaji ulang

## MITOS 3-04

# PENDAPATAN PETANI KELAPA SAWIT LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN PENDAPATAN PETANI NON SAWIT

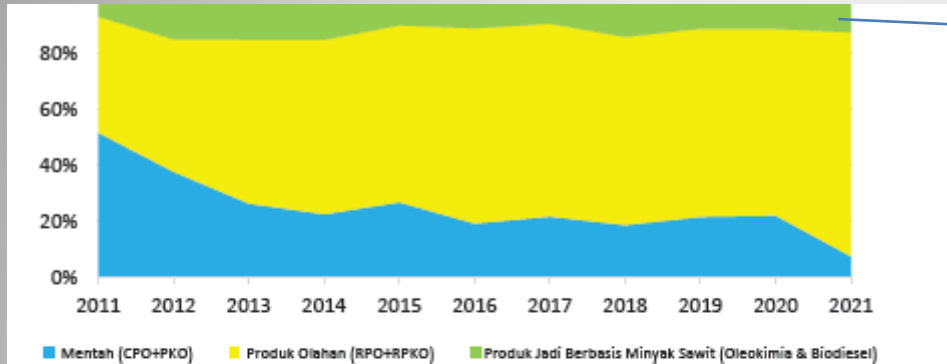
Petani sawit menikmati peningkatan pendapatan sebesar 200-300 persen setelah lima tahun melakukan budidaya kelapa sawit, kemudian pendapatannya terus meningkat menjadi 400-1,300 persen setelah 5-10 tahun dan terus meningkat menjadi 2,200-25,000 persen setelah umur tanaman kelapa sawit menginjak usia lebih dari 10 tahun. Data tersebut menunjukkan pendapatan petani sawit tidak hanya berkelanjutan tetapi juga meningkat seiring dengan peningkatan umur tanaman.

Selain pendapatan yang diterima lebih tinggi, petani sawit juga memperoleh pendapatan yang stabil karena pendapatan tersebut diperoleh secara reguler setiap bulan dari penjualan Tandan Buah Segar (Balde *et al.*, 2019; Apreisan *et al.*, 2020). Indikator lainnya yang membuktikan bahwa pendapatan petani sawit yang lebih tinggi dan stabil ditunjukkan oleh



# MITOS 3-14

## INDUSTRI SAWIT INDONESIA HANYA MENGEKSPOR BAHAN MENTAH



Data-data di atas menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi mengekspor minyak sawit mentah. Pendalaman dan perluasan hilirisasi sawit di dalam negeri masih terus berlangsung baik pada jalur *oleofood complex*, *oleochemical complex*, maupun *biofuel/bioenergy complex* sehingga akan memperbesar porsi produk jadi berbasis minyak sawit (*finished product*) untuk ditujukan baik kepada pasar domestik maupun pasar ekspor.

Gambar 3.17. Perubahan Komposisi Ekspor Produk Sawit Indonesia  
(Sumber: BPS, data diolah PASPI, 2022)

Komposisi ekspor produk sawit Indonesia pada tahun 2011 masih didominasi oleh minyak sawit mentah (CPO+CPKO) dengan pangsa 54 persen, sedangkan pangsa produk olahan baru mencapai 44 persen dan produk jadi berbasis minyak sawit hanya sebesar 2 persen. Pada tahun 2021, komposisi ekspor produk sawit Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pangsa ekspor minyak sawit mentah mengalami penurunan yang drastis menjadi hanya sekitar 7 persen. Sedangkan sisanya dalam bentuk produk olahan dan produk jadi.

Uraian dengan data tidak sesuai

# MITOS 3-17

## PUNGUTAN EKSPOR (EKSPORT LEVY) HANYA DINIKMATI OLEH PENGUSAHA BIODISEL

Salah satu program pemanfaatan dana sawit yang telah disebutkan di atas adalah insentif pengembangan BBN, khususnya biodiesel sawit. Dana sawit yang disalurkan untuk program tersebut selama periode 2015-2021 mencapai Rp 110 triliun atau 79 persen dari dana sawit yang berhasil dihimpun dari pungutan ekspor (*export levy*) pada periode tersebut (BPDPKS, 2022). Besarnya proporsi penyaluran dana sawit pada program insentif biodiesel menyebabkan program ini banyak disoroti publik.

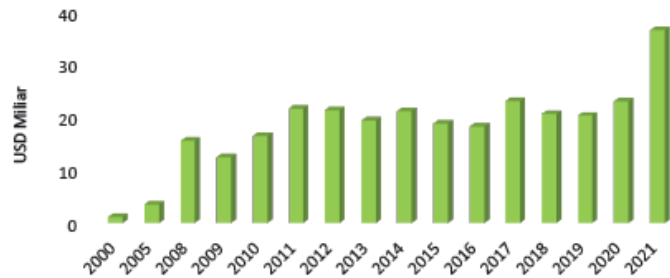
VS

Selain pengembangan BBN berbasis minyak sawit (biodiesel), pemanfaatan dana sawit juga ditujukan untuk program yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha dalam industri sawit nasional. Data BPDPKS (2022) mengungkapkan realisasi pembiayaan program sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut: Rp 6.59 triliun untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR); Rp 21.1 miliar untuk program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat; Rp 199 miliar untuk program pengembangan SDM (pelatihan petani sawit dan beasiswa anak petani sawit); dan Rp 389.3 miliar untuk program riset penelitian dan pengembangan.

- JUSTIFIKASI FAKTA INI TERLALU MAKSA

## MITOS 3-19

# DEVISA YANG DIHASILKAN INDUSTRI SAWIT INDONESIA RELATIF KECIL DIBANDINGKAN SEKTOR EKSPOR LAINNYA

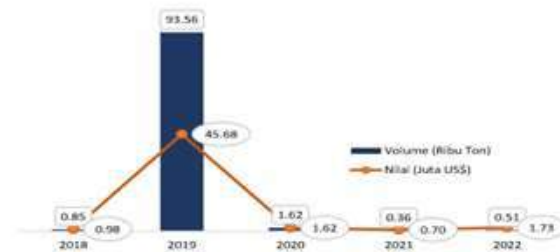


Gambar 3.20. Devisa Ekspor Produk Sawit Tahun 2000-2021 (Sumber: BPS, data diolah PASPI, 2022)

Nilai ekspor tersebut merupakan ekspor neto (devisa) karena Indonesia tidak mengimpor minyak sawit maupun produk turunannya. Pada tahun 2021, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar USD 35.34 miliar (BPS, 2022), sementara neto ekspor produk sawit pada tahun yang sama mencapai USD 36.2 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa devisa sawit lebih besar dibandingkan neraca perdagangan Indonesia. Seandainya tidak ada devisa sawit, maka neraca perdagangan Indonesia akan defisit.

### 2.4.2. Perkembangan Impor Minyak Sawit

Volume impor minyak sawit selama periode tahun 2018 sampai 2022 cenderung cukup fluktuatif. Peningkatan secara drastis terjadi pada tahun 2019. Total volume impor minyak kelapa sawit pada tahun 2019 tercatat sebesar 93,56 ribu ton atau meningkat 110,7 kali dibanding tahun 2018 dengan nilai sebesar US\$ 45,68 juta. Selanjutnya, pada tahun 2020 dan 2021 volume impor minyak sawit mengalami penurunan. Pada tahun 2021, volume impor turun menjadi 0,36 ribu ton dengan nilai sebesar US\$ 0,70 juta. Selanjutnya, pada tahun 2022 volume impor meningkat menjadi 0,51 ribu ton dengan nilai sebesar US\$ 1,73 juta. Jika pada tahun 2019, impor minyak sawit didominasi oleh *Other Palm Oil* (HS 15119000) yang mencapai 94% dari total impor minyak sawit, maka pada tahun 2020 dan 2021 impor didominasi oleh *Other Palm Oil Kernel* (HS 15132900) yang volumenya tidak jauh berbeda dengan *Other Palm Oil* (HS 15119000), masing-masing sebesar 0,664 ribu ton dan 0,657 ribu ton. Selanjutnya, pada tahun 2022, impor minyak sawit kembali didominasi oleh *Other Palm Oil* (HS 15119000) dengan volume sebesar 0,382 ribu ton dengan volume sebesar US\$ 1,401 juta.

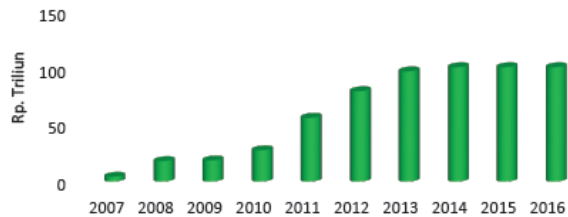


Gambar G. Perkembangan Volume dan Nilai Impor Minyak Sawit, 2018-2022

PERNYATAAN TIDAK  
BERSESUAIAN DENGAN FAKTA

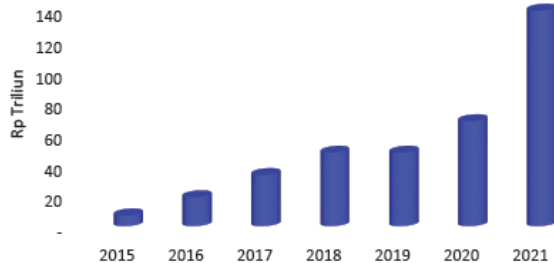
# MITOS 3-21

## INDUSTRI SAWIT TIDAK BERKONTRIBUSI PADA PENERIMAAN PEMERINTAH



Gambar 3.21. Akumulasi Penerimaan Pemerintah dari Bea Keluar Minyak Sawit (Sumber: Kementerian Keuangan, 2016 dalam Sipayung, 2018)

Secara akumulatif, penerimaan pemerintah dari bea keluar meningkat dari Rp 4.2 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 100.3 triliun pada tahun 2016 (Gambar 3.21). Sementara itu, akumulasi penerimaan pemerintah dari pungutan ekspor yang mulai diimplementasikan pada tahun 2015, juga menunjukkan peningkatan yakni dari Rp 6.9 triliun menjadi Rp 139.2 triliun pada tahun 2021 (Gambar 3.22).

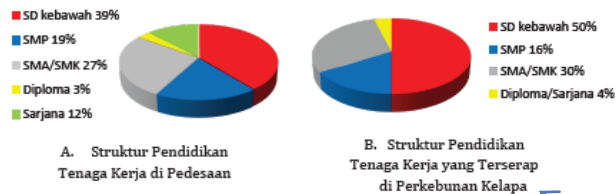


Gambar 3.22. Akumulasi Pungutan Ekspor Minyak Sawit Periode Juli 2015-2021 (Sumber: BDPKS, 2022)

DATA BK (2007 – 2016)  
KURANG BERSESUAIAN  
DENGAN DATA  
PE (2015 – 2021)

## MITOS 4 – 07

# KESEMPATAN KERJA PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI TENAGA KERJA YANG TERSEDIA DILAPANGAN



Gambar 4.4. Perbandingan Struktur Pendidikan Tenaga Kerja Pedesaan dengan Petani Sawit Periode Tahun 2020 (Sumber: PASPI, 2014; BPS, 2020 diolah PASPI, 2022)

Sementara itu, sebagian besar latar belakang pendidikan tenaga kerja yang tersetap pada perkebunan kelapa sawit secara rata-rata (Gambar 4.4 bagian B) adalah berpendidikan SD ke bawah sebesar 50 persen. Kemudian disusul oleh SMA/SMK dan SMP (46 persen), dan Diploma/Sarjana (4 persen).

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa komposisi rata-rata pendidikan tenaga kerja yang tersetap pada perkebunan kelapa sawit akomodatif dengan komposisi tenaga kerja yang tersedia di pedesaan. Pandangan bahwa tenaga kerja yang tersetap perkebunan kelapa sawit tidak sesuai dengan kualitas tenaga kerja di pedesaan adalah tidak didukung fakta.

### MITOS 4-08

*Perkebunan kelapa sawit tidak berkontribusi pada penyediaan infrastruktur di kawasan pedesaan*

PERKEBUNAN KELAPA  
BERBEDA MAKNA DIBANDING  
PERKEBUNAN KELAPA  
SAWIT

# MITOS 4-09

## PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENYEBABKAN KERUSAKAN JALAN UMUM

Tabel 4.1. Perbandingan Jalan Rusak (Kilometer) pada Provinsi Sentra Sawit dengan Non-Sentra Sawit Tahun 2020

Provinsi	Jalan Rusak	Provinsi	Jalan Rusak
Papua*	1,094	Kalimantan Tengah	269
Riau	1,093	Kepulauan Riau*	251
NTT*	916	Jambi	244
Sulawesi Selatan*	776	Gorontalo*	230
Maluku Utara*	667	Sulawesi Tenggara*	216
Sulawesi Tengah*	648	Kalimantan Utara	206
Sumatera Utara	543	Yogyakarta*	202
Kalimantan Barat	506	Jawa Barat*	191
Papua Barat*	485	Sulawesi Utara*	190
Lampung*	433	Kalimantan Selatan	182
Aceh	412	Bali*	129
Sumatera Barat*	412	Jawa Tengah*	119
Bengkulu*	405	Sulawesi Barat*	109
Sumatera Selatan	379	Jawa Timur*	99
Maluku*	373	Kep. Babel*	72
Kalimantan Timur	367	Banten*	41
NTB*	292	Indonesia	8,306

Sumber: Kementerian PUPR (2021)

Ket: \*) Provinsi bukan sentra sawit

- DATA JALAN NASIONAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PERBANDINGAN KONDISI JALAN RUSAK DI PROVINSI SENTRA SAWIT VS NON SENTRA SAWIT KURANG RELEVAN.
- PERKEBUNAN KELAPA SAWIT & PKS LEBIH BANYAK BERADA PADA JALAN PROVINSI DAN KABUPATEN YG KONDISI JALAN TIDAK DIASPAL DAN LAINNYA HAMPİR SETENGAHNYA.
- KONDISI INI SANGAT KONTRADIKTIF DENGAN BEBAN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jenis Permukaan Jalan/Type of Road Surface			Jumlah Total
	Aspal Paved	Tidak diaspal Not Paved	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
01. Kuantan Singingi	92,29	43,82	53,59	189,70
02. Indragiri Hulu	172,89	37,17	129,32	339,38
03. Indragiri Hilir	42,25	83,89	154,01	280,15
04. Pelalawan	69,58		164,01	233,59
05. Siak	114,95	33,46	6,59	155,00
06. Kampar	304,30	44,64	50,01	398,95
07. Rokan Hulu	350,83	80,63	72,12	503,58
08. Bengkalis	57,30	25,30	-	82,60
09. Rokan Hilir	74,09	43,54	100,36	217,99
10. Kepulauan Meranti	15,96	35,85	79,43	131,24
Kota/Municipality				
71. Pekanbaru	108,63	3,13	15,25	127,01
73. Dumai	19,14	58,82	62,16	140,12
<b>Riau</b>	<b>1.422,21</b>	<b>490,25</b>	<b>887,35</b>	<b>2.799,81</b>

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kondisi Jalan/Road Condition			
	Baik Good	Sedang Average	Rusak Damaged	Rusak Berat Severely Damaged
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
01. Kuantan Singingi	84,23	26,34	62,38	45,04
02. Indragiri Hulu	73,46	4,10	4,90	57,66
03. Indragiri Hilir	65,10	16,40	1,00	0,1
04. Pelalawan	16,36	29,53	70,39	14,96
05. Siak	128,34	17,87	2,95	5,84
06. Kampar	68,38	7,29	52,52	105,40
07. Rokan Hulu	77,52	19,69	56,96	125,98
08. Bengkalis	165,93	24,22	105,93	43,30
09. Rokan Hilir	120,55	11,90	51,75	5,50
10. Kepulauan Meranti	95,23	17,51	14,77	-
Kota/Municipality				
71. Pekanbaru	258,30	84,62	55,44	0,60
73. Dumai	336,96	62,15	99,43	5,04
<b>Riau</b>	<b>1.490,36</b>	<b>321,62</b>	<b>576,42</b>	<b>469,32</b>

# MITOS vs FAKTA

## KRITIS - MEMBANGUN

- PROGRAM PSR TIDAK SUKSES MEREMAJAKAN SAWIT RAKYAT
- PUNGUTAN EKSPOR DAN BEA KELUAR MEMBEBANI HARGA TBS PEKEBUN
- PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BANYAK YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN
- PEKEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT TIDAK SIAP MENGHADAPI ERA ISPO

# MITOS vs FAKTA

## PROGRAM PSR TIDAK SUKSES MEREMAJKAN SAWIT RAKYAT

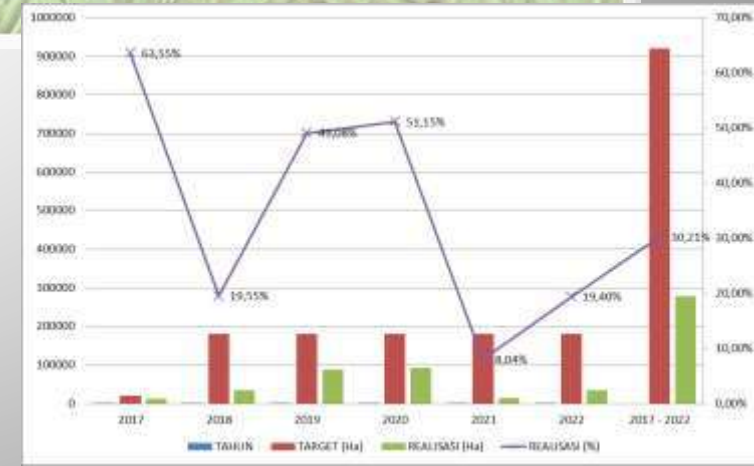
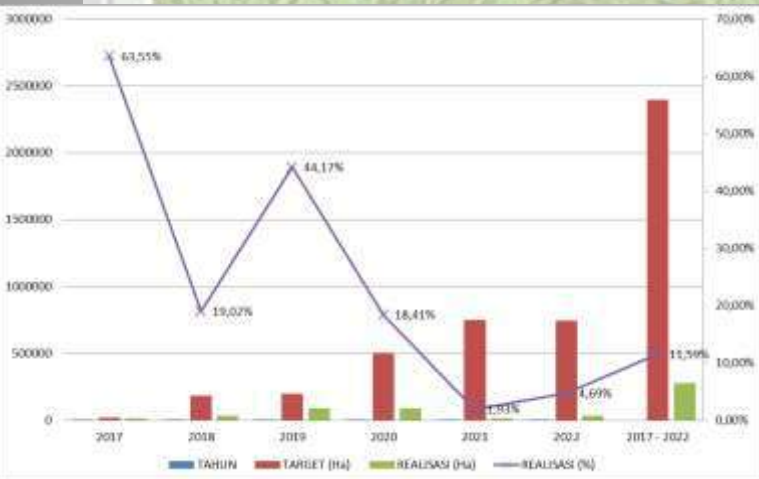
### PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT



### TARGET PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (AWAL)



### TARGET PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (DISESUAIKAN)



Pilihan //////////////

**Poin Mutasi 535  
Personel, Lima  
Kapolda Diganti**

Di Baca 144 Kali

**Jatniko Santosa  
Ditunjuk sebagai  
Direktur Utama  
PalmCo**

Di Baca 101 Kali

**Rugian Negara,  
Tersangka Tindak  
Pidana Perpajakan  
Diserahkan Ke Kejati  
Riau**

Di Baca 101 Kali

**Komitmen Anti  
Korupsi, PHR  
Pertahankan  
Sertifikasi SMAP**

Di Baca 141 Kali

**Investasi Rp3,7 Triliun  
Disetujui SKK Migas,  
PHR Siap  
Kembangkan  
Lapangan  
Rantaubais dengan  
EOR**

**TARGET BELUM TERCAPAI TERKENDALA PENATURAN PEMERINTAH INDONESIA SENDIRI!**

## Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat di Riau Masih Rendah, Parah Ini !

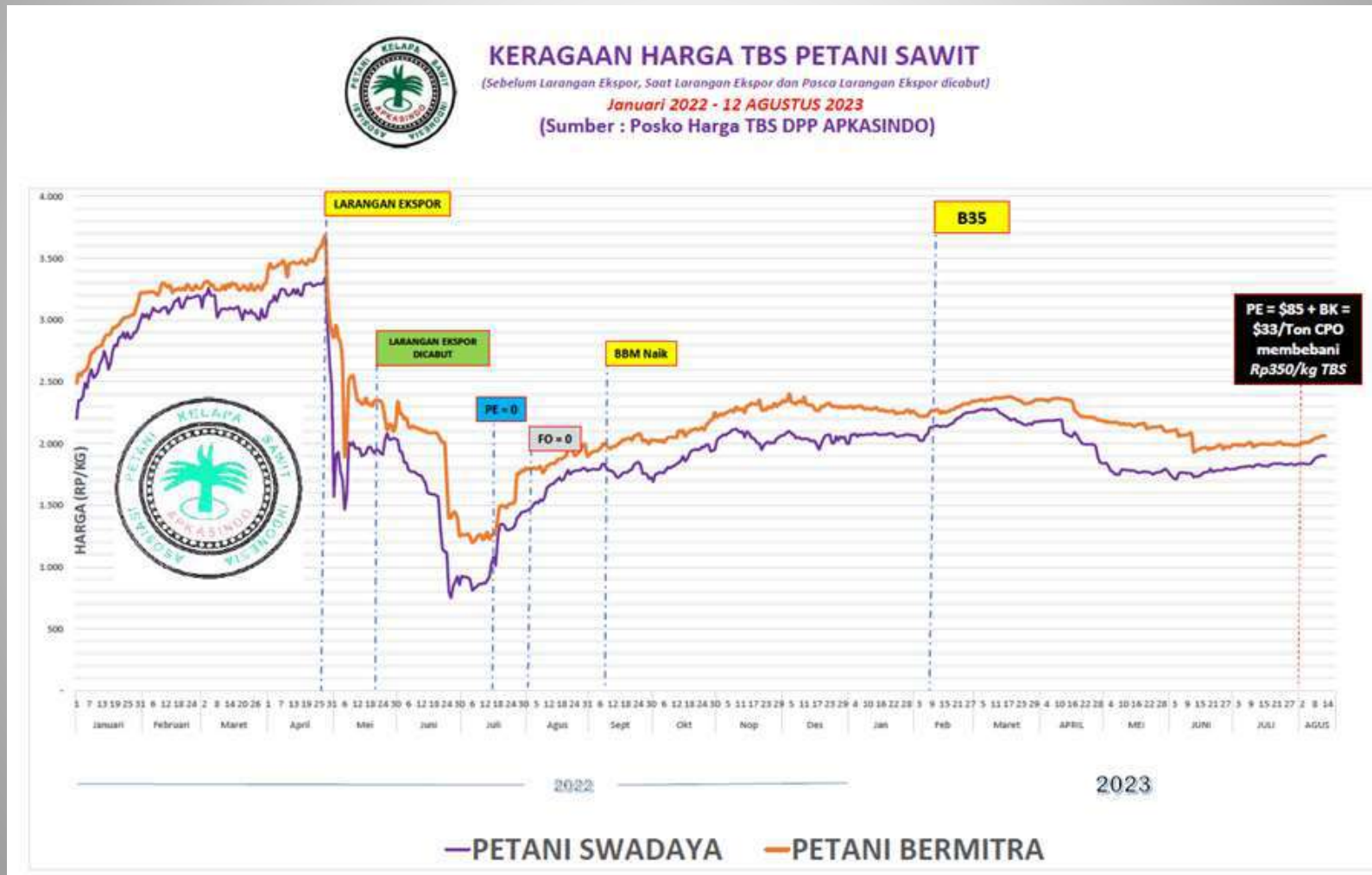
Kamis, 30 Agustus 2023 - 10:55:28 WIB

Di Baca 104 Kali



# MITOS vs FAKTA

## PUNGUTAN EKSPOR DAN BEA KELUAR MEMBEBANI HARGA TBS PEKEBUN



Siaran Pers : Dilihat: 1855

## Menkeu Tetapkan Penyesuaian Tarif Pungutan Ekspor Produk Kelapa Sawit

Jakarta, 29 Juni 2021 – Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana

ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan *cut off* perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku 7 hari setelah diundangkan pada 25 Juni 2021 (mulai berlaku pada 2 Juli 2021).

Sesuai PMK Nomor 76/PMK.05/2021, batas pengenaan tarif progresif berubah yang semula pada harga CPO US\$670/MT menjadi US\$750/MT. "Apabila harga CPO di bawah atau sama dengan US\$750/MT, maka tarif pungutan ekspor tetap, yaitu misalnya untuk tarif produk crude adalah sebesar US\$55/MT. Selanjutnya, setiap kenaikan harga CPO sebesar US\$50/MT, maka tarif pungutan ekspor naik sebesar US\$20/MT untuk produk crude, dan US\$16/MT untuk produk turunan sampai harga CPO mencapai US\$1000. Apabila harga CPO di atas US\$1000, maka tarif tetap sesuai tarif tertinggi masing-masing produk," jelas Eddy Aburrachman, Direktur Utama BPDPKS.

Dasar pertimbangan penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor adalah untuk meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Hal ini juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani kelapa sawit dan keberlanjutan pengembangan layanan pada program pembangunan industri sawit nasional, antara lain perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, serta penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel.

### Peningkatan daya Saing Produk Kelapa Sawit Indonesia

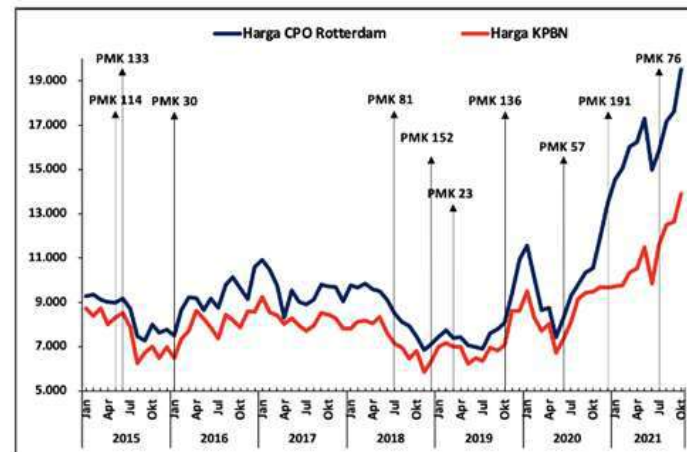
Kewajiban eksportir produk kelapa sawit yaitu pungutan ekspor dan bea keluar secara *advalorem*, saat ini mencapai 36,4% (maksimal) dari harga CPO. Dengan perubahan tarif sesuai PMK Nomor 76/PMK.05/2021, kewajiban eksportir secara *advalorem* turun menjadi maksimal di bawah 30% dari harga CPO. Penurunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk kelapa sawit di pasar internasional.

### Komitmen Peningkatan Kesejahteraan Petani

Penerapan pungutan ekspor di tahun 2020 dan tahun 2021 terbukti tidak menyebabkan penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Harga TBS di tingkat petani mengikuti kenaikan harga CPO, di mana pada bulan Januari - Mei 2021, rata-rata harga TBS di tingkat petani adalah di atas Rp2.000/Kg. Selain itu, Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. Upaya ini dilakukan dengan mengalokasikan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit untuk 180.000 hektar lahan per tahun, dengan alokasi dana untuk tiap hektar lahan yang ditetapkan sebesar Rp30.000.000/Ha.

### Mekanisme Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS)

Dalam penentuan harga TBS petani diatur dalam Permentan 01 Tahun 2018, dimana pembentukan tim harga TBS ditentukan pada tingkat provinsi. Harga CPO sebagai faktor penentu dalam rumus harga TBS. Harga CPO yang digunakan adalah bersumber dari harga KPBN. Pergerakan harga CPO Rotterdam dan CPO KPBN tahun 2015-2021 disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pergerakan harga CPO Rotterdam, CPO KPBN 2015-2021

Besaran PE yang termuat dalam PMK memberikan dampak pada peningkatan harga CPO yang berdampak pada kenaikan harga TBS tingkat petani. Secara umum terjadi kenaikan harga TBS dari tahun 2015-2021. Penentuan harga TBS kelapa sawit di provinsi juga diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur (pergub). Provinsi penghasil sawit berjumlah 22 provinsi, sedangkan yang memiliki pergub hanya 8 provinsi antara lain, Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan

# MITOS vs FAKTA

## PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BANYAK YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN



REPUBLIKA.CO.ID, Pada 16 Mei 2023 lalu, Uni Eropa (UE) memberlakukan aturan anti deforestasi melalui European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR). Melalui EUDR, UE mewajibkan setiap eksportir melakukan verifikasi untuk menjamin produknya tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan atau deforestasi sejak 2021.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan persoalan legalitas perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan bisa segera diselesaikan. Industri kelapa sawit diminta menyelesaikan syarat administrasi yang dibutuhkan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tata kelola sawit yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan 2021, luas tutupan sawit di kawasan hutan adalah 3,3 juta hektar. Dari luasan tersebut, 237.000 hektar sudah memiliki surat keputusan (SK) pelepasan kawasan hutan untuk sawit dan sekitar 913.000 hektar masih dalam proses penetapan SK. Namun, 2,2 juta hektar belum memiliki SK dan belum berproses untuk mendapatkan SK pelepasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 16,37 juta hektare. Tapi, 3,37 hektare di antaranya ilegal karena berada di dalam kawasan hutan.

**KONTAN.CO.ID - JAKARTA.** Pemerintah berencana memutihkan atau melegalkan 3,3 juta hektare (ha) perkebunan kelapa sawit yang selama ini berada di kawasan hutan. Langkah ini disebut untuk memperbaiki tata kelola industri sawit yang sebelumnya karut marut.

Dengan pemutihan ini, luas perkebunan sawit yang dimiliki perusahaan, koperasi dan masyarakat akan jelas statusnya dan mereka menjadi patuh terhadap hukum dan kewajiban pajak. Pemerintah beralih, pemutihan sebagai upaya penyelesaian masalah kebun sawit sesuai

# MITOS vs FAKTA

## PEKEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT TIDAK SIAP MENGHADAPI ERA ISPO



- Pemenuhan standar ISPO diperkebunan rakyat terkategori Sangat rendah – Rendah
- Fariyati et Al (2019) : 33,33% dan Hadi et al (2019): 13,33% serta Azizah et al (2020): 34,48%;

## KINERJA SERTIFIKASI ISPO



- Dibandingkan dengan perkebunan lainnya, 21 sertifikat ISPO untuk pekebun masih belum signifikan, dan perlu dipercepat mengingat luasan sawit yang tercover untuk pekebun mencapai 6,72 Juta Ha.
- Dari total luas areal kelapa sawit (16,83 juta ha), bersertifikat ISPO mencapai 4,53 juta ha (27%), sedangkan Non-ISPO mencapai sekitar 12,30 juta ha (73%).

**TERIMAKASIH  
DAN  
MOHON MAAF  
APABILA ADA  
KEKURANGAN**